



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



## APAKAH INTRUSI BUDAYA DALAM E-TAX SYSTEM DAPAT MENDETEKSI KECURANGAN AKUNTANSI WAJIB PAJAK?

Yenni Mangoting, Jovanna Amaris Koerniawan, Michelle Ongkojoyo\*

Universitas Kristen Petra, Jl. Siwalankerto No.121-131, Surabaya 60236

Surel: d12190036@john.petra.ac.id

Volume 13  
Nomor 2  
Halaman 242-252  
Malang, Agustus 2022  
ISSN 2086-7603  
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

12 Juni 2022

Tanggal Revisi:

08 Juli 2022

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2022

### Kata kunci:

budaya,  
maskulin,  
transparansi,  
wajib pajak

### Mengutip ini sebagai:

Mangoting, Y., Koerniawan, J. A., & Ongkojoyo, M. (2022). Apakah Intrusi Budaya dalam E-Tax System Dapat Mendeteksi Kecurangan Akuntansi Wajib Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 242-252. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.18>

### Abstrak – Apakah Intrusi Budaya dalam E-Tax System Dapat Mendeteksi Kecurangan Akuntansi Wajib Pajak?

**Tujuan utama** – Penelitian ini bertujuan menguji peran moderasi budaya dalam pengaruh penggunaan *e-tax system* untuk mendeteksi tindakan kecurangan akuntansi wajib pajak.

**Metode** – Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) sebagai metode. Sejumlah wajib pajak orang pribadi adalah sampel pada penelitian ini.

**Temuan utama** – Intrusi budaya terbukti relevan dalam mendeteksi perilaku kecurangan wajib pajak. Wajib pajak dengan budaya maskulin tinggi akan melegalkan kecurangan akuntansi untuk menyejahterakan diri. Pada sisi lainnya, wajib pajak merasa penggunaan *e-tax system* sia-sia jika dana pajak disalahgunakan

**Implikasi Teori dan Kebijakan** – Implementasi *e-tax system* dinilai sebagai suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh otoritas pajak sebagai bentuk adaptasi di era digitalisasi. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu mengidentifikasi faktor budaya wajib pajak dan menentukan langkah-langkah mitigasi dampak negatifnya melalui kebijakan perpajakan.

**Kebaruan Penelitian** – Penelitian ini menawarkan solusi membangun kepatuhan pajak berbasis sistem pajak elektronik berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada budaya wajib pajak.

### Abstract – Can Cultural Intrusion in E-Tax System Detect Taxpayer Accounting Fraud?

**Main Purpose** – This study aims to examine the role of cultural moderation in the effect of using an *e-tax system* to detect accounting tax fraud.

**Method** – This study uses the *Partial Least Square* (PLS) as a method. A number of individual taxpayers are the sample.

**Main Findings** – Cultural intrusion proved relevant in detecting fraudulent. Taxpayers with a high masculine culture will legalize the fraud for their own welfare. On the other hand, they feel that the use of the *e-tax system* is futile if tax funds are misused

**Theory and Practical Implications** – The implementation of the *e-tax system* should be done by the tax authorities as a form of adaptation in digitalization era. Therefore, the tax authorities need to identify the cultural factors of taxpayers and determine measures to mitigate the negative impacts through taxation policies.

**Novelty** – This research offers a solution to build tax compliance based on an *e-tax system* based on an approach that is oriented towards taxpayer culture.



Pandemi Covid-19, selain berdampak terhadap perubahan signifikan model bisnis dan lalu lintas transaksi ekonomi termasuk perilaku wajib pajak, juga berdampak pada pelemahan kemampuan ekonomis wajib pajak. Perubahan kondisi ekonomi menjadi lebih sulit ini membuat semakin banyak wajib pajak memilih memanfaatkan kecurangan akuntansi sebagai jalan meningkatkan kemampuan ekonomis. Pada umumnya, wajib pajak memanfaatkan dua cara untuk meminimalisasi pembayaran pajak yaitu melalui *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penelitian ini memilih *tax evasion* untuk mengukur kecurangan akuntansi wajib pajak karena praktik *tax evasion* menggunakan cara-cara ilegal yang melanggar hukum. Inasius (2019) menyatakan bahwa wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi cenderung melakukan *accounting fraud* seperti manipulasi penghasilan menjadi lebih rendah dari sebenarnya demi mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Perilaku kecurangan akuntansi wajib pajak yang sudah dilakukan tersebut, besar kemungkinan akan dilakukan kembali di masa depan. Hal ini banyak ditemukan di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, reformasi pada sistem administrasi perpajakan menjadi penting untuk mengurangi praktik manipulasi akuntansi dalam rangka kecurangan akuntansi wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi pajak secara lebih luas dapat menjamin keandalan dalam pengawasan dan transparansi yang berdampak pada berkurangnya kecurangan akuntansi wajib pajak (Mascagni et al., 2021; Onu & Oats, 2016; Uyar et al., 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa modernisasi pada sistem administrasi pajak menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan budaya Hofstede, terutama individualisme dan maskulinisme sebagai faktor intervensi untuk mengetahui sejauh mana budaya mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam penggunaan *e-tax system*. Dimensi individualisme dan maskulinisme dipilih karena penelitian Hofstede (2001) menyatakan Indonesia memiliki indeks skor 14 yang menandakan tipe masyarakat kolektif dan skor 46 untuk maskulin yang menandakan Indonesia memiliki skor lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya, namun tidak termasuk dalam kategori sangat rendah hingga dapat dikatakan sebagai feminitas. Berdasarkan teori budaya Hofstede, masyarakat atau wajib pajak dengan budaya individualisme yang memprioritaskan kepentingan pribadi dan keluarga terbukti memiliki kepatuhan pajak rendah karena tidak melihat pajak sebagai pembayaran yang menguntungkan. El-Helalyet al. (2020) juga menjelaskan bahwa masyarakat atau wajib pajak maskulin tinggi yang menonjolkan sisi kekuatan dominan dalam menyelesaikan masalah cenderung memiliki agresivitas pajak tinggi. Dengan demikian, memahami kepatuhan pajak seharusnya memasukkan faktor budaya.

Interaksi pengaruh budaya dengan *e-tax system* yang akan dikaji dalam penelitian ini, dibangun berdasarkan kerangka pemikiran bahwa kepatuhan pajak merupakan pengambilan keputusan etis yang terlibat dalam perilaku wajib pajak saat menjalankan kewajiban pajak. *E-tax system* adalah cara otoritas pajak dalam suatu negara berinovasi dalam administrasi perpajakan. Dalam pengembangan selanjutnya, teknologi akan dikembangkan berbasis akuntansi yang memungkinkan data terhubung dan terstruktur dengan baik, disimpan, dan diakses dengan mudah. Hal ini berbanding terbalik dengan data dalam konsep akuntansi tradisional yang tidak saling terhubung sehingga sangat mungkin terjadi rekayasa-rekayasa akuntansi. Dalam konteks mikro, implementasi teknologi *blockchain* dalam bursa saham dapat mengamankan investasi para investor dari manipulasi laporan keuangan perusahaan (Roszkowska, 2021; Yefni et al., 2018). Teknologi memungkinkan data yang terkumpul dengan baik dikombinasikan dengan peningkatan kekuatan pemrosesan sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak. Demikian juga dengan teknologi akses ke informasi pihak ketiga yang begitu lengkap memudahkan otoritas pajak memverifikasi data keuangan wajib pajak.

Faktor budaya jarang dianggap sebagai faktor kontekstual yang menonjol dalam studi empiris tentang pengembangan *e-government* atau layanan-layanan pemerintah dan ekonomi digital meski sebenarnya memiliki peran penting (Ali et al., 2018). Tidak banyak penelitian mengenai pengembangan layanan administrasi perpajakan yang mengaitkan unsur budaya di dalamnya. Maka dari itu, salah satu kontribusi penting penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah mengintegrasikan budaya dan menguji efeknya secara empiris. Respons wajib pajak terhadap kecurangan akuntansi bergantung pada bagaimana budaya wajib pajak menerjemahkan manfaat yang dirasakan melalui pembayaran pajak. Ketika pajak dipromosikan sebagai kegiatan yang menyenangkan, menguntungkan, dan menolong negara, hal tersebut akan membentuk sikap positif sehingga mengembangkan budaya pajak yang berdampak pada perilaku kepatuhan pajak (Hermanto et al., 2022; Wardani & Susilowati, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh moderasi budaya dalam penggunaan *e-tax system* terhadap perilaku kecurangan akuntansi wajib pajak melalui berbagai cara seperti manipulasi akuntansi. Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan sudut pandang baru bagi otoritas pajak terkait faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Selain faktor seperti penyediaan fasilitas, insentif dan lainnya, regulator perlu membongkai kebijakan perpajakan yang berorientasi pada budaya wajib pajak sebagai salah satu faktor penentu untuk memaksimal-

kan efektifitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, ke depannya pelaporan yang dilakukan wajib pajak, baik untuk keperluan akuntansi maupun pajak dilakukan dengan jujur sesuai kebijakan yang berlaku.

## METODE

Penelitian ini menggunakan *e-tax system* sebagai variabel independen dan *tax evasion* sebagai variabel dependen. Peneliti juga menggunakan variabel moderasi yaitu individualisme dan maskulinisme, yang diduga dengan kehadiran kedua variabel tersebut dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *e-tax system* dalam rangka mengurangi *tax evasion*. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode survei atau penyebaran kuesioner yang dilaksanakan secara daring pada tahun 2022. Kriteria responden untuk kuesioner ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Indonesia, dalam arti telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jawaban responden dari kuesioner diukur berdasarkan skala likert 5 poin untuk mengukur sifat wajib pajak pribadi. Adapun model data penelitian ini diolah menggunakan PLS (*Partial Least Square*).

Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual penelitian. Berdasarkan Gambar 1, model persamaan yang digunakan adalah:

$$TE = \alpha + \beta_1 IT + \beta_2 (IT * MAS) + \beta_3 (IT * IDV) + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut, variabel dependen pertama adalah teknologi informasi yang diproses melalui *e-tax system* (IT). Pada abad ke dua puluh satu ini, teknologi informasi berperan sebagai pembentuk ekonomi (Akram et al., 2019, Umar & Masud, 2020). Pengaruhnya meningkat dengan sangat cepat ke seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali pada proses administrasi pajak. Dalam penelitian ini, teknologi informasi mengacu pada konsep *e-government*. *E-government* menyediakan banyak layanan, salah satunya terkait pajak atau yang dikenal sebagai *e-tax system*.

*E-tax system* merupakan sarana yang memungkinkan wajib pajak mengumpulkan dokumen-dokumen pajak mereka melalui internet sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas dan keperluan mobilitas wajib pajak karena dapat dilakukan di mana pun (Siglé et al., 2022). Pertanyaan kuesioner terkait *e-tax system* berfokus pada penggunaan teknologi dalam perpajakan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya, sekaligus sebagai upaya mengurangi tindak kecurangan dalam pajak (Akram et al., 2019; Night & Bananuka, 2020). Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mempertanyakan persetujuan responden mengenai apakah implementasi *e-tax system* mendorong wajib

pajak menggunakan sistem pajak secara daring dalam proses pelaporan maupun pembayaran pajak, apakah penggunaan *e-tax system* menolong mereka melakukan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, apakah *e-tax system* memberikan informasi yang lebih akurat terkait pajak, serta apakah *e-tax system* menolong mereka terhindar dari perilaku pelanggaran.

Kesiapan dan penerapan *e-tax system* maupun layanan *e-government* lainnya turut disebabkan oleh berbagai faktor, satu di antaranya adalah budaya nasional. Lebih lanjut melalui pengaruhnya pada adopsi, penerimaan dan pemanfaatan teknologi, budaya nasional dapat mempengaruhi sejauh mana tujuan penerapan *e-tax system* tercapai (Nam, 2018). Budaya nasional Hofstede merupakan teori yang paling banyak digunakan dalam penelitian akademis. Variabel budaya Hofstede menjelaskan esensi budaya nasional dengan cara yang berguna dalam penelitian akademis (Khalil & Sidani, 2022; Vinson et al., 2020).

Dalam penelitian ini, dimensi budaya Hofstede yang digunakan adalah individualisme dan maskulinisme. Dimensi individualisme (IDV) mengukur tingkat ketergantungan individu pada kelompok, sedangkan dimensi maskulinisme (MAS) mengukur orientasi nilai yang dominan pada masyarakat (Hofstede, 2011). Pertanyaan kuesioner sebagai indikator individualisme fokus pada proses pengambilan keputusan individual; fokus pada diri sendiri atau sudut pandang sosial. Melalui pertanyaan kuesioner dapat dilihat kecenderungan individual masing-masing wajib pajak, terutama pendapat mereka mengenai pentingnya manfaat yang diterima secara individu setelah melakukan pembayaran pajak, pemenuhan kewajiban pajak yang tidak mempertimbangkan dampak bagi masyarakat, ketidakpedulian wajib pajak akan kesulitan pengumpulan pajak negara, pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan hanya jika bermanfaat bagi diri sendiri, serta pendapat mengenai tidak perlunya membayar pajak apabila hasilnya diberikan kepada orang lain. Adapun pertanyaan kuesioner sebagai indikator maskulinisme berfokus pada sejauh mana individu berorientasi pada kompetisi dan kesuksesan (Seno et al., 2022). Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan preferensi wajib pajak saat berhadapan dengan otoritas pajak. Apakah wajib pajak cenderung mempertahankan keputusan yang telah dibuat dan menyanggah otoritas pajak atau memilih bernegosiasi dengan mereka, terutama dalam gugatan pajak. Selain itu, peneliti juga mempertanyakan kepercayaan diri wajib pajak dalam membuat keputusan terkait dengan permasalahan perpajakan yang harus dihadapi.

Kecurangan akuntansi merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam usahanya untuk mengurangi dan/atau mengambil keuntungan dari kewajiban dan hak perpajakannya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka anut seperti budaya, kepercayaan, maupun lingkungan sekitar (Seno et al., 2022). Pertanyaan kuesioner sebagai indikator kecurangan akuntansi berfokus pada persepsi wajib pajak mengenai suatu kondisi dalam perilaku kecurangan (Ortas & Gallego-Álvarez, 2020). Masing-masing wajib pajak dipertanyakan pilihannya ketika dihadapkan pada situasi yang dapat menggugah niat untuk melakukan pelanggaran pajak seperti ketidakmampuan membayar pajak, ketidakadilan sistem perpajakan, pembenaran tindakan pelanggaran pajak apabila semua orang melakukannya, pengorupsian dana pajak, rendahnya persentase penangkapan akibat tindakan pelanggaran pajak, serta dana pajak negara yang terbuang percuma.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Persoalan utama dalam akuntansi perpajakan adalah bagaimana mengubah perilaku kepatuhan pajak dengan perluasan *e-tax system* yang memberikan kemudahan memenuhi kewajiban perpajakan (Achim et al., 2019; Hambali, 2020; Harkushenko et al., 2022). Meskipun sistem akuntansi perpajakan memiliki modal besar dalam membentuk kepatuhan sukarela wajib pajak (Millane & Stewart, 2019), pemahaman yang lebih baik tentang motif wajib pajak dan sikap serta perilaku mereka terhadap pengembangan administrasi perpajakan berbasis *e-system* dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan efisiensi administrasi pajak.

Sistem akuntansi perpajakan menimbulkan beragam perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan bergantung pada sejauh mana wajib pajak menilai apakah sistem perpajakan dan interaksi dengan otoritas pajak berjalan baik (Prastiwi et al., 2019). Namun, *e-tax system* dalam perspektif wajib pajak kerap dikaitkan dengan mudahnya otoritas pajak mendeteksi tindakan penghindaran atau kecurangan akuntansi karena informasi yang terformat digital akan terintegrasi dan mudah diakses sehingga meningkatkan kemampuan

pemerintah melacak dan menganalisis transaksi-transaksi ekonomi wajib pajak untuk menguji kepatuhan pajak (Alm, 2021). Bahkan, wajib pajak membaca adanya risiko bawaan yang lebih besar dari manfaat yang dirasakan yang mempengaruhi niat menggunakan *e-tax system* (Andriani et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan budaya pajak yang benar sebagai upaya mendukung implementasi *e-tax system*.

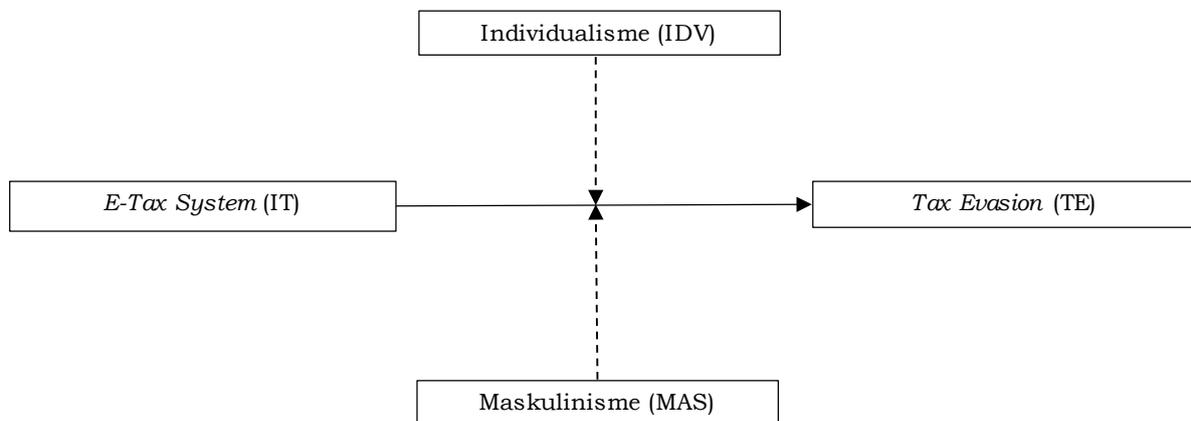
Budaya pajak merupakan konsep multidisiplin yang di satu sisi terungkap melalui pendekatan aktivitas, artinya wajib pajak akan menunjukkan budaya pajak yang baik ketika memiliki moral dan pengetahuan tentang sistem perpajakan (Hermanto et al., 2022; Wardani & Susilowati, 2020). Implikasinya, pemahaman perilaku kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan interaksionis faktor budaya terhadap hubungan *e-tax system* dan kecurangan akuntansi.

**Hasil Uji Regresi.** Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian regresi. Berdasarkan Tabel 1, hasil persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$TE = \alpha - 0,386IT - 0,363(IT*MAS) - 0,045(IT*IDV) + \epsilon \quad (i)$$

Persamaan ini merepresentasikan bahwa variabel *e-tax system* (IT) memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi wajib pajak. Pada sisi lainnya, maskulinisme sebagai variabel moderasi ditemukan memberikan pengaruh yang memperlemah, sedangkan budaya individualisme tidak memiliki pengaruh signifikan yang memperkuat maupun memperlemah dalam interaksinya dengan *e-tax system* terhadap kecurangan akuntansi wajib pajak.

Hasil pada paragraf di atas menunjukkan bahwa selain penggunaan *e-tax system*, budaya wajib pajak benar-benar memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku mereka terhadap pajak. Budaya dalam KBBI dimaknai sebagai 'kebiasaan individu yang sulit untuk diubah'. Budaya mampu mengubah perilaku individu karena kecer-



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

**Tabel 1 Hasil Uji Regresi**

<b>Efek Langsung</b>	<b>Nilai Koefisien</b>	<b>Nilai P</b>
IT → TE	-0,386	<0,001
MAS*IT → TE	-0,363	<0,001
IDV*IT → TE	-0,045	0,310

dasan budaya akan mendorong seseorang untuk selalu beradaptasi dengan keragaman pengaruh yang timbul di lingkungannya agar sejalan dengan prinsip budaya yang dimiliki. Maka dari itu, terkait dengan kewajiban pajak wajib pajak, Alm (2021) dan Andriani et al. (2022) menjelaskan bahwa peran individu dan nilai-nilai wajib pajak sendirilah yang mendorong preferensi dan sikap mereka dalam kontribusi kepada publik.

**Pengaruh *e-tax system* terhadap kecurangan akuntansi wajib pajak.** Informasi dalam Tabel 1 membuktikan bahwa penggunaan *e-tax system* yang semakin tinggi dapat mengurangi kecurangan akuntansi wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu milik Babici et al. (2019), Night & Bananuka (2020), Onu & Oats (2016), dan Prabowo et al. (2022) juga menyatakan adanya penurunan dalam tindakan kecurangan akuntansi wajib pajak apabila penggunaan *e-tax system* tinggi. Pemenuhan kewajiban pajak terutama dalam hal pelaporan pajak dipermudah karena kehadiran teknologi, terutama *e-tax system*.

Upaya modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari pengembangan fasilitas perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, menyediakan akses ke informasi tentang kewajiban perpajakan dan pelaporan, menyajikan metode sederhana untuk pembayaran pajak, mengurangi interaksi tatap muka dengan otoritas pajak, serta memfasilitasi perluasan kapasitas audit. Penggunaan *e-tax system* dapat menyederhanakan beberapa aspek, terutama dalam pengisian laporan surat pemberitahuan (SPT) dan seluruh pembayaran yang terkait dalam pajak sehingga proses pelaksanaan kewajiban pajak setiap wajib pajak dapat dipermudah. Selain itu, pelaporan SPT secara daring melalui *e-tax system* dapat membuat wajib pajak lebih taat dan tepat waktu dalam melakukan pelaporan pajak.

Di sisi lain, kehadiran *e-tax system* dapat membantu keefektifan dan keefisienan kinerja petugas pajak dalam mengumpulkan informasi mengenai setiap wajib pajak serta melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Lebih lanjut, implementasi *e-tax system* dapat mempermudah proses audit laporan keuangan karena otoritas pajak dapat dengan mudah melacak jejak yang ditinggalkan wajib pajak dalam transaksi bisnis mereka sehingga dapat membuat proses pencarian data dalam rangka pengujian kepatuhan menjadi lebih singkat dan tepat. Dengan ini, otoritas pajak dapat dengan mudah menemukan wajib pajak yang melakukan

manipulasi laporan keuangan atau bentuk kecurangan akuntansi lainnya untuk mengurangi jumlah pajak terhutang yang seharusnya dibayarkan. Misalnya dengan memanfaatkan fasilitas negara *tax haven*, menggunakan harga transfer yang tidak wajar, serta melakukan pencucian uang. Maka dari itu, penerapan *e-tax system* dapat menstimulus wajib pajak untuk melaporkan pajak sesuai keadaan sebenarnya dan meminimalisasi tindakan kecurangan akuntansi.

Risiko pajak yang lebih kecil dan pembayaran pajak yang maksimal dihasilkan pada penggunaan *e-tax system* berkualitas tinggi (Hamilton & Stekelberg, 2016; Mangoting et al., 2020). OECD turut menyetujui pernyataan ini dengan merekomendasikan agar otoritas pajak memperluas modernisasi sistem perpajakan dengan mengimplementasikan *e-tax system* yang tidak terbatas pada *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*. Otoritas pajak Indonesia menyambut baik tawaran OECD tersebut dengan mengimplementasikan penggunaan e-Faktur 3.2 sebagai bentuk tindak lanjut atas berubahnya tarif PPN menjadi 11% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 7 ayat (1). Implementasi ini juga sekaligus sebagai upaya menyeragamkan sistem administrasi. Kelanjutan modernisasi e-system oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dilaksanakan dengan membangun *core tax system* menggunakan model *blockchain technology* yang mengintegrasikan sistem administrasi pajak dengan sistem lain.

**Pengaruh interaksi budaya individualisme dan *e-tax system* terhadap kecurangan akuntansi wajib pajak.** Hasil pengujian moderasi dalam Tabel 1 menunjukkan individualisme tidak dapat memoderasi pengaruh *e-tax system* terhadap kecurangan akuntansi wajib pajak. Hasil yang diperoleh peneliti dapat menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya individualisme wajib pajak tidak memberi pengaruh yang memperkuat maupun memperlemah penggunaan *e-tax system* untuk mengurangi kecurangan akuntansi.

Hasil ini memang tampak berbeda temuan El-Helalyet al. (2020) dan Seno et al. (2022) bahwa individualisme wajib pajak dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Sifat “ke aku-an” akan tampak dalam masyarakat dengan individualisme tinggi yang hanya berfokus pada diri sendiri. Dalam perspektif makro, masyarakat dalam suatu negara dengan budaya individualisme tinggi memberikan pembenaran terhadap kecurangan akuntansi wajib pajak. Masyarakat di negara

tersebut tidak melihat manfaat dan sesuatu yang menguntungkan dengan membayar pajak.

Bukan suatu rahasia bahwa membayar pajak memunculkan sikap dilema wajib pajak (Suantari et al., 2020; Toly et al., 2021). Dilema menyulitkan wajib pajak karena persepsi bahwa pajak dibangun berdasarkan kontrak psikologis dengan pemerintah sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diberikan akan menempatkan wajib pajak pada posisi memilih patuh atau tidak patuh. Pola pikir wajib pajak yang individualistis akan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Wajib pajak yang individualistis menggunakan prinsip *economic individualism* yang memandang bahwa kekayaan yang mereka dapatkan adalah hasil kerja keras sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Dengan prinsip *economic individualism* ini, wajib pajak yang umumnya berada di negara-negara maju akan resisten terhadap kebijakan pajak ketika penghasilan yang mereka dapatkan dengan kerja keras didistribusikan untuk dimanfaatkan oleh komunitas lain melalui implementasi kebijakan perpajakan (Doo & Yoon, 2020). Sikap resisten ini dapat menyebabkan wajib pajak berani mengambil risiko untuk melakukan tindakan seperti *income smoothing* pada laporan keuangan demi memperoleh laba lebih banyak dan pajak terhutang lebih sedikit.

Sikap dilema ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Benkraiem et al. (2021) bahwa wajib pajak dengan budaya individualisme cenderung lebih berani mengambil risiko sehingga mengarahkan pada volatilitas lebih tinggi dalam pendapatan aktual dan mendorong untuk terlibat dalam praktik manajemen laba. Bahkan, wajib pajak yang individualistis menurut Haga et al. (2019) berani menentang dan mengatakan pemerintah tidak adil dan menghilangkan hak individu ketika upaya menumpuk penghasilan hasil dari kerja keras tergerus oleh kebijakan tarif pajak yang tinggi. Pernyataan di atas sejalan dengan individualisme dalam konsep budaya Hofstede jika dikaitkan dengan adanya jarak dalam hubungan antara individu. Semakin longgar saling ketergantungan di dalam suatu masyarakat menandakan tingkat individualisme tinggi (Hofstede, 2011).

Pada sisi lainnya, hasil dari penelitian ini juga membuktikan pengaruh individualisme wajib pajak tidak memberikan efek moderasi signifikan. Sifat wajib pajak tidak berorientasi pada tinggi rendahnya karakter individualistis. Wajib pajak dalam penelitian ini tidak menunjukkan faktor independensi yang tinggi sebagai penciri dari karakter individualistis, namun tidak juga menunjukkan faktor dependen yang tinggi sebagai ciri dari karakter kolektivisme. Bai et al. (2019) menjelaskan budaya Amerika cenderung mengutamakan individu yang mandiri dari ketergantungan dengan orang lain sedangkan budaya

Asia menekankan keterkaitan mendasar individu satu sama lain. Dua kecenderungan inilah yang tampak dalam responden penelitian sehingga hasil uji moderasi budaya individu gagal mempengaruhi penggunaan *e-tax system* untuk mengurangi kecurangan akuntansi wajib pajak. Sejalan dengan itu, Ariyanto (2020) juga mengatakan bahwa tindakan agresivitas pajak individu tidak dipengaruhi oleh budaya individualisme pada negara mereka. Hal tersebut sesuai dengan teori budaya Hofstede (2011) yang mengatakan bahwa masyarakat individualis akan memandang individu sebagai seorang yang otonom, tidak mengikatkan diri pada suatu komunitas atau golongan. Dapat dijelaskan bahwa wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya apa adanya sebagai bagian dari kewajiban berbangsa dan bernegara.

Sikap individualistis tidak selalu berujung pada tindakan negatif. Dalam kaitannya dengan aktivitas manipulasi dan kecurangan, wajib pajak dengan tingkat individualisme rendah atau kolektivis dapat lebih mungkin untuk terlibat. Penelitian Mangoting et al. (2020) dan Nguyen et al. (2021) menemukan bahwa tindakan penipuan akuntansi memerlukan kooperasi oleh lebih dari satu pihak agar lebih mudah untuk dilakukan. Wajib pajak akan bekerja sama dengan pihak lain seperti auditor, konsultan pajak, atau bahkan regulator pajak untuk memanipulasi akun-akun dalam laporan keuangan demi memperoleh keuntungan dari kecurangan akuntansi. Di sisi lain, wajib pajak dengan individualisme tinggi justru cenderung lebih jujur dalam pelaporan keuangannya termasuk untuk keperluan pajak karena berprinsip bahwa ketentuan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah telah memenuhi standar nilai untuk semua orang sehingga wajib untuk dilaksanakan (Chong et al., 2019; Sritharan et al., 2020).

Penggunaan *e-tax system* direspons standar dan pada umumnya oleh wajib pajak sebagai kebijakan perpajakan yang memang seharusnya diimplementasikan oleh otoritas pajak dalam rangka adaptasi terhadap kehadiran teknologi. Wajib pajak tidak melibatkan perasaan budaya dalam pengambilan keputusan apakah akan memanfaatkan *e-tax system* untuk mengurangi pembayaran pajak karena menganggap manfaat dan dampak dari ketentuan undang-undang perpajakan berlaku bagi setiap orang tanpa memandang status. Dengan demikian, wajib pajak batal melakukan tindakan kecurangan akuntansi.

**Pengaruh interaksi budaya maskulin dan e-tax system dengan kecurangan akuntansi wajib pajak.** Berbeda dengan hasil yang diperoleh dalam pengujian individualisme, hasil pengujian Tabel 1 menunjukkan adanya pengaruh yang dapat memoderasi relasi antara *e-tax system* dan kecurangan akuntansi wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya maskulin wajib pajak memberi pengaruh negatif atau dapat

melemahkan pengaruh penggunaan *e-tax system* dalam upaya mengurangi kecurangan akuntansi wajib pajak.

Definisi maskulinisme dalam budaya (Hofstede, 2011) dapat digambarkan sebagai pilihan peran sosial dan pengaruhnya pada konsep diri. Negara dengan budaya maskulin memandang kompetisi dan pencapaian secara material yang terlihat sebagai nilai penting. Sebaliknya pada budaya maskulin rendah atau yang lebih dikenal dengan femininitas, masyarakat cenderung mengutamakan kesederhanaan, kepedulian, dan kualitas hidup. Wajib pajak dengan budaya yang cenderung maskulin lebih berorientasi pada dimensi sifat laki-laki yang mengandung dimensi dari sangat asertif dan kompetitif (Hofstede, 2001).

Benkraiem et al. (2021) dan Mangoting et al. (2020) berargumentasi bahwa wajib pajak dengan budaya maskulin akan berusaha untuk meningkatkan ego, kekayaan, dan pengakuan sehingga fokus mengejar kesuksesan finansial yang menyebabkan kecenderungan untuk melakukan kecurangan juga lebih tinggi. Wajib pajak tidak akan segan melakukan praktik manajemen laba demi memenuhi target keuangan tujuan mereka. Hal ini menyebabkan praktik manajemen laba menjadi lebih lazim dilakukan oleh masyarakat dengan budaya maskulin tinggi. Maka dari itu, dalam budaya maskulin terdapat kemungkinan lebih besar wajib pajak juga membenarkan tindakan *tax evasion* sebagai salah satu upaya mereka mencapai kesuksesan finansial.

Hasil yang diperoleh penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menegaskan bahwa budaya maskulin tidak memberi pengaruh signifikan pada penggunaan teknologi dalam hal kepatuhan wajib pajak (Ali et al., 2018; Deaconu & Cuzdriorean, 2016; Zhao et al., 2015). Pengaruh tidak signifikan yang ditemukan penelitian-penelitian tersebut cenderung disebabkan karena hanya menggunakan data sekunder. Meskipun sumber dari data sekunder yang diteliti merupakan lembaga atau tim penelitian berpengalaman, data tersebut tetap terbatas oleh perubahan dan perkembangan yang terjadi secara berkelanjutan. Misalnya, faktor seperti invasi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada budaya suatu negara (Martins, 2017). Oleh karena itu, tetap diperlukan pengumpulan data primer dari komunitas internasional, nasional, atau lokal melalui penelitian yang ekstensif dan eklektik.

Keinginan memperoleh pengakuan atas kesuksesan finansial yang diiringi sifat egois wajib pajak sebagai ciri budaya maskulin tinggi membuat mereka memiliki pendapatan lebih tinggi yang diperoleh melalui kecurangan akuntansi. Ciziceno & Pizzuto (2022) mendukung pendapat ini dengan temuan penelitian mereka yang menyatakan bahwa individu dalam negara dengan budaya maskulin tinggi cenderung memiliki sifat egois. Mereka berfokus pada meningkatkan

kekayaan material demi memperoleh pengakuan sehingga tendensi untuk melakukan kecurangan juga menjadi lebih tinggi. Orientasi pengakuan atas kesuksesan tinggi yang condong pada perilaku kecurangan ini kemudian menyebabkan wajib pajak menjadi lebih agresif dalam upaya meminimalisasi kewajiban pajaknya. Kecenderungan tersebut ditunjukkan melalui sikap memilih untuk mempertahankan keputusan dan menyanggah otoritas pajak dibanding bernegosiasi dengan mereka, bahkan ketika wajib pajak harus terlibat dalam gugatan pajak akibat kecurangan yang dilakukan. Wajib pajak akan berusaha memberikan bukti yang menjustifikasi kecurangan mereka sebagai tindakan yang benar menggunakan standar akuntansi perpajakan yang berlaku. Daya saing interpersonal yang tinggi dalam diri wajib pajak menyebabkan konfrontasi terhadap otoritas pajak untuk bertahan dengan pilihan mereka menjadi sesuatu yang memiliki peluang besar untuk dilakukan. Argumentasi ini juga didukung penelitian Seno et al. (2022) yang mengungkapkan dalam masyarakat dengan budaya maskulin tinggi, seseorang cenderung bersikap agresif dan kuat dalam hal pemecahan masalah.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi pun, yaitu *e-tax system* sebagai metode meningkatkan kepatuhan, wajib pajak yang memiliki budaya maskulin rendah cenderung lebih memandang positif penerapan *e-tax system* untuk mengurangi *tax evasion*. Individu yang tidak maskulin atau cenderung feminin lebih mendukung adanya kesetaraan gender, ada proses pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik yang menstimulus lebih banyak pertukaran informasi dan membuat kemungkinan diadopsinya suatu teknologi menjadi lebih besar (Night & Bananuka, 2020). Penerapan *e-tax system* akan menjadi suatu hal positif yang dapat menambah angka kepatuhan wajib pajak sehingga secara tidak langsung turut meningkatkan kualitas kehidupan. Argumen ini diperkuat dengan penelitian Seno et al. (2022) yang menyatakan dalam budaya yang tingkat maskulinitasnya rendah, masyarakat percaya bahwa kehidupan yang berkualitas bagi semua orang dapat dicapai melalui pendanaan berbasis pajak. Pendanaan berbasis pajak ini tentu mengindikasikan perlunya kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajibannya. Adapun wajib pajak dengan budaya maskulin tinggi cenderung tidak memandang penerapan *e-tax system* sebagai suatu hal yang positif.

Sebagai budaya yang menekankan pada pencapaian, manfaat yang dapat dicapai dari adanya *e-tax system* menjadi aspek penting yang dilihat besar (Night & Bananuka, 2020). Ketika wajib pajak melihat implementasi *e-tax system* dalam pembayaran pajak tidak mencapai manfaat apapun, mereka cenderung memilih melakukan tindak kecurangan. Misal saja ketika *e-tax system* sudah diterapkan namun dana pajak yang

terkumpul tetap dikorupsi oleh oknum pejabat hingga akhirnya menggunakan *e-tax system* dirasa sebagai pekerjaan yang sia-sia. Hal ini sesuai dengan konteks budaya maskulin menurut Hofstede (2011) yakni pencapaian diasosiasikan sebagai sesuatu yang berasal dari pekerjaan karena pekerjaan dianggap sebagai hal penting, bahkan lebih daripada keluarga.

Budaya maskulin tinggi di sisi lain juga dapat menimbulkan pengaruh yang berlawanan. Wajib pajak dengan tingkat maskulinisme tinggi justru lebih cenderung tidak terlibat dalam kecurangan akuntansi. Bame-Aldred et al. (2013) menemukan bahwa wajib pajak dengan orientasi kesuksesan tinggi atau budaya ketegasan (kedua nilai ini merupakan bagian dari budaya maskulin) biasanya menganut prinsip yang memotivasi diri mereka untuk menghindari membenarkan perilaku kecurangan akuntansi. Grabiński & Wójciszewicz (2022) dan Kuehnhanss & Heyndels (2018) lebih lanjut menyatakan bahwa budaya maskulin tinggi cenderung kurang toleran terhadap para pelanggar hukum. Wajib pajak dengan budaya maskulin tinggi akan lebih taat pada standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku sehingga mendukung transparansi laporan keuangan.

Terkait pemanfaatan *e-tax system*, Koong et al. (2019) dan Zaidi et al. (2017) mendapatkan adanya koneksi positif antara kemudahan yang dirasakan wajib pajak dengan kepuasan mereka dalam menggunakan *e-tax system*. Hal ini berarti *e-tax system* dilihat sebagai sarana yang mempermudah terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak. Jiwa kompetitif yang tertanam dalam kepribadian wajib pajak dapat meningkatkan kedalaman dan luasnya adopsi *e-tax system* untuk keperluan pajak mereka. Ambisi mencapai kesuksesan tinggi yang diiringi dengan sifat kompetitif juga akan mendorong wajib pajak untuk mencari cara meningkatkan keuntungan tanpa memanipulasi laporan pajak mereka.

Jika dihadapkan pada otoritas pajak, sifat kompetitif membuat wajib pajak memiliki rasa percaya diri untuk membuat keputusan sembari memberikan penalaran etis kuat yang mendasari keputusan tersebut untuk memperoleh tujuan pencapaiannya melalui jalur yang benar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan *e-tax system* murni dilihat sebagai sarana yang bermanfaat dan mempermudah memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak tidak memiliki motivasi menggunakan *e-tax system* sebagai sarana melakukan kecurangan akuntansi karena budaya orientasi pada keberhasilan yang mereka miliki menekankan pada penerapan aturan main yang setara bagi setiap wajib pajak, serta sanksi tegas bagi wajib pajak yang berusaha menggelapkan pajak.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa teori budaya Hofstede relevan dalam menjawab bagaimana budaya dapat mempengaruhi perilaku

wajib pajak dalam memanfaatkan *e-tax system* untuk kecurangan akuntansi. Keberadaan wajib pajak dengan budaya maskulin cenderung resisten terhadap penggunaan *e-tax system* karena mampu meningkatkan transparansi data wajib pajak sehingga manipulasi data keuangan tidak lagi dapat mereka lakukan dengan mudah. Pada sisi lain, budaya individualis wajib pajak ditemukan tidak memberikan pengaruh yang memperkuat maupun memperlemah dalam pemanfaatan *e-tax system* untuk mengurangi kecurangan akuntansi wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan implementasi *e-tax system* dinilai sebagai sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan oleh otoritas pajak sebagai bentuk adaptasi di era digitalisasi. Dari sisi otoritas pajak, *e-tax system* dapat meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk pengambilan keputusan apakah wajib pajak melakukan kecurangan atau tidak.

Praktik kecurangan akuntansi wajib pajak umumnya dilakukan melalui tindakan manipulasi laba akuntansi yang mempengaruhi angka laba fiskal dengan menyajikan nilai yang lebih tinggi untuk beban dan kerugian atau mencatat nilai aset lebih rendah dari yang seharusnya bahkan tidak melaporkan sama sekali. Meskipun upaya manipulasi laba pajak melalui praktik *understatement* atau *overstatement* akun-akun akuntansi dapat disesuaikan melalui koreksi fiskal oleh otoritas pajak, namun demikian tindakan tersebut bersifat sementara. Modernisasi *e-tax system* yang turut mempengaruhi proses akuntansi perlu diimbangi dengan pembaharuan standar akuntansi secara berkelanjutan oleh regulator. Perlu kesepakatan dua pilar regulator, yaitu otoritas profesi akuntan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk meluaskan aplikasi teknologi akuntansi dan mengintegrasikan sistem akuntansi tersebut dalam *core tax system*. Pengintegrasian dan perluasan lingkup *e-tax system* untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi laporan keuangan komersial dan fiskal akan berdampak pada tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan pajak. Selain itu, praktik kecurangan akuntansi wajib pajak perlu disikapi dengan tegas oleh otoritas profesi akuntan dengan meluaskan fungsi teknologi dalam mendukung pelaporan akuntansi dan menguatkan peran akuntan forensik yang dapat mendeteksi kecurangan akuntansi dan perpajakan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel ini.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Achim, M. V., Borlea, S. N., Găban, L. V., & Mihăilă, A. A. (2019). The Shadow Economy and Culture: Evidence in European Countries. *Eastern European Economics*, 57(5), 352-374. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1614461>

- Akram, M. S., Malik, A., Shareef, M. A., & Go-  
raya, M. A. S. (2019). Exploring the Inter-  
relationships between Technological Pred-  
ictors and Behavioral Mediators in Online  
Tax Filing: The Moderating Role of Perceived  
Risk. *Government Information Quarterly*,  
36(2), 237–251. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.007>
- Ali, M. A., Hoque, M. R., & Alam, K. (2018). An  
Empirical Investigation of the Relationship  
between *E-government* Development and  
the Digital Economy: The Case of Asian  
Countries. *Journal of Knowledge Man-  
agement*, 22(5), 1176–1200. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0477>
- Alm, J. (2021). Tax Evasion, Technology, and In-  
equality. *Economics of Governance*, 22(4),  
321–343. <https://doi.org/10.1007/s10101-021-00247-w>
- Andriani, L., Bruno, R., Douarin, E., & Stepi-  
en-Baig, P. (2022). Is Tax Morale Culturally  
Driven? *Journal of Institutional Economics*,  
18(1), 67–84. <https://doi.org/10.1017/S1744137421000072>
- Ariyanto, D. (2020). Influence of Justice, Culture  
and Love of Money towards Ethical Percep-  
tion on Tax Evasion with Gender as Mod-  
erating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Babici, G., Crivelli, E., & Marinkov, M. (2019). Tax  
Administration Strength and Tax Efficiency  
in Emerging Europe: Lessons for Romania.  
*International Economic Journal*, 33(4), 741–  
756. <https://doi.org/10.1080/10168737.2019.1689283>
- Bai, S., Koong, K. S., Wu, F., & Bhuyan, J. (2019).  
Adoption of E-Filing: The US Journey. *Inter-  
national Journal of Revenue Management*,  
11(1-2), 1–22. <https://doi.org/10.1504/IJRM.2019.103008>
- Bame-Aldred, C. W., Cullen, J. B., Martin, K. D.,  
& Parboteeah, K. P. (2013). National Culture  
and Firm-level Tax Evasion. *Journal of Busi-  
ness Research*, 66(3), 390–396. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.08.020>
- Benkraiem, R., Uyar, A., Kilic, M., & Schneider, F.  
(2021). Ethical Behavior, Auditing Strength,  
and Tax Evasion: A Worldwide Perspective.  
*Journal of International Accounting, Audit-  
ing and Taxation*, 43, 100380. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100380>
- Chong, K., Yusri, Y., Selamat, A. I., & Ong, T. S.  
(2019). Tax Climate Manipulation on Indi-  
vidual Tax Behavioural Intentions. *Journal  
of Applied Accounting Research*, 20(3), 230–  
242. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2019-0001>
- Ciziceno, M., & Pizzuto, P. (2022). Life Satisfaction  
and Tax Morale: The Role of Trust in Go-  
vernment and Cultural Orientation. *Journal  
of Behavioral and Experimental Economics*,  
97, 101824. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.101824>
- Deaconu, A., & Cuzdriorean, D. D. (2016). On the  
Tax-Accounting Linkage in the European  
Emerging Context. *Journal of Accounting in  
Emerging Economies*, 6(3), 206–231. <https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2013-0051>
- Doo, S., & Yoon, S. (2020). Tax-Motivated Income  
Shifting and Board Structure: Evidence  
from Korean Business Groups. *Journal of  
Contemporary Accounting and Economics*,  
16(3), 100221. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100221>
- El-Helaly, M., Ntim, C. G., & Soliman, M. (2020).  
The Role of National Culture in Interna-  
tional Financial Reporting Standards Adop-  
tion. *Research in International Business  
and Finance*, 54, 101241. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101241>
- Grabiński, K., & Wójtowicz, P. (2022). The Impact  
of Catholic Religion on Earnings Manage-  
ment: A Case of Poland. *Journal of Interna-  
tional Financial Management and Account-  
ing*, 33(1), 18–56. <https://doi.org/10.1111/jifm.12141>
- Haga, J., Höglund, H., & Sundvik, D. (2019). Cost  
Behavior around Corporate Tax Rate Cuts.  
*Journal of International Accounting, Audit-  
ing and Taxation*, 34, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.01.001>
- Hambali, A. J. H. (2020). The Success of E-Filing  
Adoption during Covid 19 Pandemic: The  
Role of Collaborative Quality, User Inten-  
tion, and User Satisfaction. *Journal of Eco-  
nomics, Business, & Accountancy Ventura*,  
23(1), 57–68. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i1.2233>
- Hamilton, R., & Stekelberg, J. (2016). The Effect  
of High-Quality Information Technology  
on Corporate Tax Avoidance and Tax Risk.  
*Journal of Information Systems*, 31(2), 83–  
106. <https://doi.org/10.2308/isys-51482>
- Harkushenko, O. N. (2022). Prospects of VAT  
Administration Improvement in Digitalized  
World: Analytical Review. *Journal of Tax Re-  
form*, 8(1), 6–24. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.1.105>
- Hermanto, A. H., Windasari, N. A., & Purwaneg-  
ara, M. S. (2022). Taxpayers' Adoption of  
Online Tax Return Reporting: Extended  
Meta-UTAUT Model Perspective. *Cogent  
Business and Management*, 9(1), 2110724.  
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110724>
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. Sage Publications.

- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1), 1–26. <https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014>
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Khalil, S., & Sidani, Y. (2022). Personality Traits, Religiosity, Income, and Tax Evasion Attitudes: An Exploratory Study in Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 47, 100469. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2022.100469>
- Koong, K. S., Bai, S., Tejinder, S., & Morris, C. (2019). Advancements and Forecasts of Electronic Tax Return and Informational Filings in the US. *International Journal of Accounting and Information Management*, 27(2), 352–371. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-06-2018-0072>
- Kuehnhanss, C. R., & Heyndels, B. (2018). All's Fair in Taxation: A Framing Experiment with Local Politicians. *Journal of Economic Psychology*, 65, 26–40. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.01.004>
- Mangoting, Y., Christopher., Kriwangko, N., & Adriyani, W. (2020). Interaksi Komitmen dalam Dinamika Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 265–277. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.16>
- Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs Increase Tax Compliance? Evidence on Taxpayer Responses to Technological Innovation in Ethiopia. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 189, 172–193. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007>
- Martins, A. F. (2017). Accounting Information and its Impact in Transfer Pricing Tax Compliance: A Portuguese View. *EuroMed Journal of Business*, 12(2), 207–220. <https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2016-0029>
- Millane, E., & Stewart, M. (2019). Behavioural Insights in Tax Collection: Getting the Legal Settings Right. *EJournal of Tax Research*, 16(3), 500–535.
- Nam, T. (2018). Examining the Anti-corruption Effect of E-government and the Moderating Effect of National Culture: A Cross-Country Study. *Government Information Quarterly*, 35(2), 273–282. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.005>
- Nguyen, L. A., O'Connell, B., Kend, M., Pham, V. A. T., & Vesty, G. (2021). The Likelihood of Widespread Accounting Manipulation within An Emerging Economy. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(2), 312–339. <https://doi.org/10.1108/JAEE-02-2020-0041>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The Mediating Role of Adoption of an Electronic Tax System in The Relationship between Attitude towards Electronic Tax System and Tax Compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JE-FAS-07-2018-0066>
- Onu, D., & Oats, L. (2016). “Paying Tax is Part of Life”: Social Norms and Social Influence in Tax Communications. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 124, 29–42. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.11.017>
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the Gap between Corporate Social Responsibility Performance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of National Culture. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(4), 825–855. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- Prabowo, R., Sucahyo, U. S., Damayanti, T. W., & Supramono, S. (2022). Tax Enforcement and Private Firms' Audited Financial Statements: The Moderating Role of Secrecy Culture. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(3), 547–565. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0014>
- Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019). Sintesis Sistem Akuntansi Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 276–294. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10016>
- Roszkowska, P. (2021). Fintech in Financial Reporting and Audit for Fraud Prevention and Safeguarding Equity Investments. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 17(2), 164–196. <https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2019-0098>
- Seno, R., Hashim, H. A., Taha, R., & Hamid, S. A. (2022). The Influence of Hofstede's Cultural Dimension on Tax Compliance Behaviour of Tax Practitioners. *Asian Review of Accounting*, 30(1), 77–96. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2020-0153>
- Siglé, M. A., Goslinga, S., Speklé, R. F., & Hel, L. E. C. J. M. V. D. (2022). The Cooperative Approach to Corporate Tax Compliance: An Empirical Assessment. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100447. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2022.100447>
- Sritharan, N., Salawati, S., & Cheuk, S. C. (2020). How Social Factor Determine Individual

- Taxpayers' Tax Compliance Behaviour in Malaysia? *International Journal of Business and Society*, 21(3), 1444-1463.
- Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Toly, A. A., Gunawan, I. A., Marchella, J., & Olivia, N. (2021). Bagaimana Kondisi Demografi Menjadi Penentu Moral Pajak saat Covid-19? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 388-400. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.22>
- Umar, M. A., & Masud, A. (2020). Why Information Technology is Constrained in Tackling Tax Noncompliance in Developing Countries: Nigerian Tax Administrators' Perspectives. *Accounting Research Journal*, 33(2), 307-322. <https://doi.org/10.1108/ARJ-11-2018-0205>
- Uyar, A., Nimer, K., Kuzey, C., Shahbaz, M., & Schneider, F. (2021). Can E-government Initiatives Alleviate Tax Evasion? *The Moderation Effect of ICT. Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120597. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120597>
- Vinson, J. M., Curtis, M. B., Conover, T. L., & Chui, L. (2020). Ethical Relativism in Accounting: A Cross-Cultural Examination of the Influence of Culture and Risk Taking Propensity on Ethical Decision-Making. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 41, 100350. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100350>
- Wardani, D., & Susilowati, W. (2020). Urgensi Transparansi Informasi dalam Perlawanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 127-137. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.08>
- Yefni, Murniati, S., Zifi, M. P., & Yuliantoro, H. R. (2018). What are the Motivation of Taxpayers in Using E-Filing Information System?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 510-525. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9030>
- Zaidi, S. K. R., Henderson, C. D., & Gupta, G. (2017). The Moderating Effect of Culture on E-filing Taxes: Evidence From India. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(1), 134-152. <https://doi.org/10.1108/jaee-05-2015-0038>
- Zhao, F., Wallis, J., & Singh, M. (2015). E-government Development and the Digital Economy: A Reciprocal Relationship. *Internet Research*, 25(5), 734-766. <https://doi.org/10.1108/IntR-02-2014-0055>